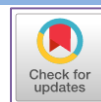


## Dengan cara apa mengajar tidak sepenuhnya dianggap profesi?



Taufik Hilam <sup>1,a,\*</sup>, Nandang Rusmana <sup>1,b</sup>, Pandu Hyangsewu <sup>1,c</sup>, Lanang Riyadi <sup>2,d</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Indonesia. Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bandung, 40154, Indonesia

<sup>2</sup> EssenVille Primary School. Jl. PHH Mustopa No. 72, Bandung, 40124, Indonesia

<sup>a</sup> [taufikhilman@smalabupi.sch.id](mailto:taufikhilman@smalabupi.sch.id); <sup>b</sup> [nandangrusmana@upi.edu](mailto:nandangrusmana@upi.edu); <sup>c</sup> [hyangsewu@upi.edu](mailto:hyangsewu@upi.edu);

<sup>d</sup> [lanangriyadi@gmail.com](mailto:lanangriyadi@gmail.com)

\* Corresponding Author.

Receipt: 17 June 2024; Revision: 15 August 2024; Accepted: 17 November 2024

**Abstrak:** Profesi mengajar sering kali tidak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak. Artikel ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap profesi mengajar di Indonesia, dengan fokus pada persyaratan pendidikan, tingkat gaji, otonomi profesional, dan pandangan tradisional tentang pendidikan. Metode penelitian menggunakan tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa persyaratan pendidikan dan sertifikasi guru bervariasi, dengan implementasi yang tidak konsisten di seluruh negeri. Tingkat gaji guru masih tergolong rendah, sementara otonomi profesional mereka dalam pengajaran sering kali terbatas. Pandangan tradisional tentang pendidikan sering kali menganggap guru sebagai penjaga nilai-nilai moral, yang dapat mengurangi pengakuan terhadap profesionalisme mereka. Implikasi dari temuan ini menyoroti perlunya tindakan untuk meningkatkan status profesional guru di Indonesia, termasuk peningkatan gaji, pemberian otonomi yang lebih besar, dan edukasi masyarakat tentang peran penting guru dalam pembangunan bangsa. Dengan menerapkan rekomendasi yang diajukan, diharapkan dapat tercapai perbaikan dalam kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

**Kata Kunci:** Profesi Mengajar, Persyaratan Pendidikan, Gaji Guru, Otonomi Profesional, Pandangan Tradisional

## In what ways is teaching not fully considered a profession?

**Abstract:** This article investigates the factors that influence perceptions of the teaching profession in Indonesia, focusing on educational requirements, salary levels, professional autonomy, and traditional views of education. The research method uses a literature review to gather information from various relevant sources. Findings show that teacher education and certification requirements vary, with inconsistent implementation across the country. Teachers' salary levels remain low, while their professional autonomy in teaching is often limited. Traditional views of education often regard teachers as guardians of moral values, which can reduce recognition of their professionalism. The implications of these findings highlight the need for action to improve the professional status of teachers in Indonesia, including increased salaries, greater autonomy and public education about the important role teachers play in nation-building. By implementing the proposed recommendations, it is hoped that improvements in the quality of education and human resource development in Indonesia can be achieved.

**Keywords:** Teaching Profession, Educational Requirements, Teacher Salary, Professional Autonomy, Traditional Views

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Profesi mengajar memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan suatu bangsa (Disas, 2017; Riduan, 2021; Sopian, 2016). Di Indonesia, guru sering disebut sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa" karena peran mereka yang krusial dalam mendidik generasi penerus bangsa. Namun, meskipun peran mereka sangat vital, profesi mengajar sering kali tidak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak. Hal ini memunculkan pertanyaan: dalam cara apa mengajar tidak sepenuhnya dianggap sebagai profesi di Indonesia?

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pendidikannya. Salah satu aspek krusial yang sering menjadi sorotan adalah kualitas dan status profesional guru. Guru merupakan ujung tombak dalam sistem pendidikan, namun sering kali mereka tidak mendapatkan dukungan dan penghargaan yang proporsional dengan peran dan tanggung jawab mereka. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mengenai bagaimana profesi mengajar dipersepsikan dan dihargai di Indonesia. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidik. Penting untuk mengeksplorasi apa yang mendefinisikan sebuah profesi dan bagaimana mengajar mungkin tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup persyaratan pendidikan dan sertifikasi yang beragam, gaji dan penghargaan yang tidak memadai, kurangnya otonomi profesional, serta pandangan tradisional tentang pendidikan.

Persyaratan pendidikan dan sertifikasi bagi guru di Indonesia masih sangat bervariasi dan tidak konsisten. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah menetapkan standar minimal untuk kualifikasi guru, implementasi di lapangan sering kali berbeda-beda. Di daerah perkotaan atau sekolah-sekolah dengan sumber daya lebih baik, persyaratan pendidikan dan sertifikasi mungkin lebih tinggi dan ketat; namun di daerah pedesaan atau terpencil, sering kali standar ini lebih longgar karena keterbatasan sumber daya manusia dan akses pendidikan (Musdalifah, 2021; Putriyani et al., 2018). Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia.

Tingkat gaji dan penghargaan bagi guru di Indonesia masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan profesi lain yang membutuhkan tingkat pendidikan yang setara. Gaji yang rendah tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan guru secara langsung, tetapi juga berdampak pada motivasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugasnya (Indriyani et al., 2020; Mansir, 2020). Realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa upaya ini belum cukup untuk menutup kesenjangan yang ada. Selain gaji, kurangnya penghargaan dan pengakuan sosial juga menjadi masalah yang mempengaruhi status profesional guru (Husnunnadia & Masyithoh, 2024; Sholeh, 2023).

Tingkat otonomi yang dimiliki guru dalam praktik pengajaran mereka juga menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana profesi ini dipersepsikan. Meskipun ada kebijakan yang mendukung kebebasan guru dalam mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran, banyak guru yang merasa terbatas oleh pedoman yang ketat dan tekanan administratif (Ichsan, 2014). Kurikulum yang sering berubah dan kebijakan top-down yang kaku dapat menghambat kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar. Kurangnya otonomi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan guru, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas.

Pandangan tradisional tentang pendidikan di Indonesia sering kali melihat guru

sebagai penjaga nilai-nilai moral dan sosial (Kamaruddin dkk., 2023), daripada sebagai profesional yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus. Pandangan ini tercermin dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat, serta dalam sistem pendidikan yang ada. Guru diharapkan untuk menjadi panutan moral dan agen sosial, yang sering kali menempatkan beban tambahan di luar tugas pengajaran mereka. Sementara peran ini sangat penting, namun kurangnya pengakuan terhadap aspek profesionalisme dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk menjadi guru yang efektif dapat mengurangi penghargaan terhadap profesi ini.

Artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh profesi pengajar dan mengapa profesi ini perlu mendapat pengakuan yang lebih besar dari masyarakat. Dalam prosesnya, kita juga akan melihat bagaimana perubahan dalam kebijakan pendidikan dan persepsi publik dapat membantu meningkatkan status profesional guru, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan lebih dihargai. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh guru serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan status profesional mereka. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia, demi tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan guru.

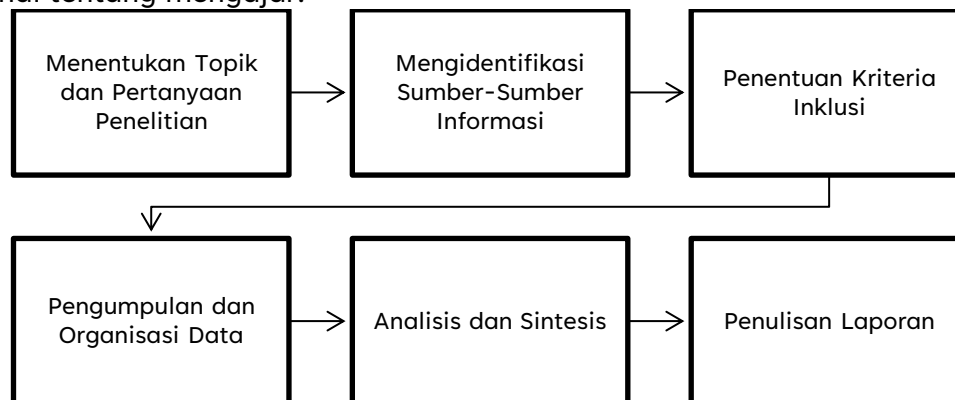
Penelitian ini penting karena memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat diperbaiki untuk mendukung guru sebagai profesional yang berharga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan. Banyak yang berpendapat bahwa mengajar tidak sepenuhnya diakui sebagai profesi yang berdiri sejajar dengan profesi lain seperti kedokteran, hukum, atau teknik. Dengan menetapkan kerangka kerja ini, pembaca dapat memahami kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi apakah mengajar memenuhi standar tersebut.

## METODE

Untuk memahami secara mendalam mengapa mengajar sering kali tidak sepenuhnya dianggap sebagai profesi, penelitian ini akan menggunakan metode tinjauan literatur. Tinjauan literatur sistematis digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan menginterpretasikan penelitian yang ada dan sumber-sumber informasi lainnya terkait topik tertentu (Riyadi & Sukmayadi, 2023; Triandini et al., 2019). Strategi pencarian dalam tinjauan literatur sistematis memanfaatkan database penulisan online, yaitu *Google Scholar*. Pencarian dilakukan secara manual dengan kata kunci persyaratan pendidikan guru; kompetensi guru; pendapatan guru; pandangan guru. Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam melaksanakan tinjauan literatur sistematis ini. Penelitian yang digunakan ialah penelitian yang dipublikasikan 10 tahun terakhir (2014-2023).

Langkah pertama memecah pertanyaan penelitian dalam fokus persyaratan pendidikan dan sertifikasi untuk guru; tingkat gaji dan penghargaan yang diterima oleh guru dibandingkan dengan profesi lain; besar otonomi yang dimiliki guru dalam praktik pengajaran mereka; pandangan tradisional tentang pendidikan yang mempengaruhi persepsi terhadap profesi mengajar. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan. Ini termasuk jurnal akademik dan artikel penelitian yang diterbitkan serta buku-buku dan bab buku yang berkaitan dengan pedagogi dan profesi mengajar. Untuk memastikan relevansi dan kualitas

sumber-sumber yang dikumpulkan, kriteria inklusi akan ditetapkan: (1) penelitian yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan data terbaru; dan (2) sumber yang fokus pada persyaratan pendidikan, gaji, otonomi profesional, dan pandangan tradisional tentang mengajar.



Gambar 1. Alur Tinjauan Literatur

Setelah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan mengorganisasikan data. Ini melibatkan pengunduhan dan menyimpan artikel, laporan, dan data relevan; membuat ringkasan dan catatan dari setiap sumber yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian; menggunakan perangkat lunak manajemen referensi, yakni Mendeley untuk mengelola kutipan dan referensi. Langkah analisis dan sintesis adalah tahap di mana data yang dikumpulkan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini meliputi perbandingan temuan dari berbagai sumber; pengidentifikasian tema-tema utama dan pola yang muncul dari literatur; menilai kekuatan dan kelemahan dari berbagai studi dan laporan; mengintegrasikan hasil analisis ke dalam struktur yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian (Ananda et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persyaratan Pendidikan dan Sertifikasi Guru

Pendidikan merupakan sebuah syarat keprofesian guru dan sertifikasi guru merupakan sertifikat yang diberikan kepada guru setelah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas (Latiana, 2019). Persyaratan pendidikan dan sertifikasi bagi guru di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis sekolah dan daerah tempat mereka mengajar. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan standar minimal, implementasi dan penegakan standar tersebut sering kali tidak konsisten di seluruh negeri.

Guru di sekolah negeri cenderung memiliki persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan guru di sekolah swasta. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua guru memenuhi standar pendidikan yang memadai. Di beberapa daerah, terutama di perkotaan atau daerah yang lebih maju secara ekonomi, persyaratan pendidikan untuk menjadi guru mungkin lebih tinggi, sering kali memerlukan gelar sarjana pendidikan atau bidang terkait, dan sertifikasi khusus dalam mengajar. Namun, di daerah pedesaan atau terpencil, persyaratan pendidikan bisa lebih rendah, dengan beberapa sekolah mungkin hanya memerlukan lulusan SMA atau setara, dan sertifikasi yang lebih sederhana.

**Tabel 1.** Temuan Terkait Persyaratan dan Sertifikasi Guru

No.	Penulis	Tahun	Temuan
1.	Sunhaji	2014	Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru, dilakukan melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Peningkatan dalam aspek-aspek ini merupakan syarat mutlak atau kewajiban nasional bagi bangsa Indonesia.
2.	Vito & Krisnani	2015	Faktor utama dalam menangani kesenjangan pendidikan antara daerah pedesaan dan perkotaan adalah peran guru. Guru memegang tanggung jawab penting dalam mendidik anak bangsa untuk mencapai pendidikan berkualitas. Walaupun kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada tenaga pendidik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh alokasi dana, sarana, dan prasarana yang mendukung, peran guru tetap sangat krusial dalam memajukan dunia pendidikan.
3.	Yunalis & Herman	2018	Peran guru sangat penting dalam membentuk kepribadian, cita-cita, dan visi masa depan siswa. Kesuksesan murid sering kali berkat guru profesional yang memberikan inspirasi dan motivasi. Salah satu kemampuan kunci yang harus dimiliki guru adalah kemampuan profesional.
4.	Latiana	2019	Pengakuan terhadap status guru sebagai tenaga profesional diberikan melalui sertifikat profesi yang diperoleh setelah menjalani uji sertifikasi. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik profesional.
5.	Syarafudin & Ikawati	2020	Beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme seorang guru meliputi standar kualifikasi guru, kesesuaian antara bidang keahlian guru dengan tugas mengajar, kemampuan dan motivasi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta penguasaan kompetensi sosial, pedagogik, dan keterampilan.

Selain itu, proses sertifikasi guru juga dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menyederhanakan proses tersebut, namun masih ada kendala administratif dan birokratis yang dapat menghambat para calon guru untuk memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan antara guru yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi. Secara keseluruhan, kendala dalam persyaratan pendidikan dan sertifikasi guru di Indonesia dapat memengaruhi kualitas dan konsistensi pendidikan yang diberikan kepada siswa. Upaya perbaikan dalam penyederhanaan proses sertifikasi, peningkatan standar pendidikan, dan konsistensi implementasi kebijakan pendidikan dapat membantu mengatasi tantangan ini dan meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia.

Persyaratan pendidikan dan sertifikasi guru merupakan aspek fundamental dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah menetapkan standar minimal untuk kualifikasi guru, implementasi dan konsistensi penerapannya sering kali menjadi tantangan. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang terkait dengan persyaratan pendidikan dan sertifikasi guru di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, guru di Indonesia diharapkan memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 dari program studi yang relevan. Namun, studi menunjukkan bahwa banyak guru, terutama di daerah terpencil, tidak memenuhi standar ini. Penelitian oleh Vito & Krisnani (2015) menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% guru di daerah pedesaan yang memiliki kualifikasi sesuai standar tersebut. Kekurangan guru yang memenuhi syarat ini terutama disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan tinggi dan ketidakmerataan distribusi guru.

Proses sertifikasi guru di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi profesional yang diperlukan. Namun, studi oleh Syarafudin & Ikawati (2020) mengungkapkan bahwa proses sertifikasi sering kali berbelit-belit dan memakan waktu. Banyak guru mengeluhkan tentang kompleksitas administratif dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti program sertifikasi. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran bahwa program sertifikasi lebih berfokus pada aspek administratif daripada peningkatan kualitas pengajaran. Sebagai contoh, dalam tulisan Gintings (2010) menunjukkan bahwa banyak guru yang merasa bahwa materi sertifikasi tidak relevan dengan kebutuhan praktis mereka di kelas. Implementasi standar pendidikan dan sertifikasi guru di lapangan sangat bervariasi. Penelitian oleh Yunalis & Herman (2018) menemukan bahwa di daerah perkotaan, standar pendidikan dan proses sertifikasi lebih ketat dan diawasi dengan baik. Sebaliknya, di daerah pedesaan dan terpencil, implementasi standar ini lebih longgar.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Misalnya, di beberapa daerah terpencil, sekolah-sekolah terpaksa merekrut guru dengan kualifikasi di bawah standar karena tidak ada pilihan lain.

Kualifikasi dan sertifikasi yang memadai berkorelasi positif dengan kualitas pengajaran. Studi oleh Sunhaji (2014) menunjukkan bahwa guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan telah melalui proses sertifikasi yang komprehensif cenderung lebih efektif dalam mengajar dan memiliki metode pengajaran yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memanfaatkan teknologi dalam pengajaran. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi guru, seperti melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan peningkatan tunjangan bagi guru bersertifikasi. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun program-program ini dirancang dengan baik, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya.

### **Gaji dan Penghargaan bagi Guru di Indonesia**

Gaji dan penghargaan bagi guru adalah salah satu aspek krusial dalam memastikan kesejahteraan mereka dan memotivasi kinerja profesional. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam hal gaji dan penghargaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat gaji guru di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan profesi lain yang memerlukan tingkat pendidikan dan tanggung jawab yang serupa (Rinanda & Hastalona, 2023; Widiarto, 2020). Gaji awal guru di Indonesia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama bagi guru-guru yang bekerja di daerah perkotaan dengan biaya hidup yang tinggi. Gaji yang rendah ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi guru tetapi juga berdampak pada motivasi dan kinerja mereka.

Gaji guru di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan profesi lain yang memerlukan kualifikasi pendidikan yang sama, seperti insinyur atau dokter. Hal ini dapat membuat profesi mengajar kurang menarik bagi individu-individu yang berbakat dan berkualifikasi tinggi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Ketidakadilan dalam sistem penggajian ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan *turn-over* yang tinggi di kalangan guru. Penghargaan non-material seperti pengakuan



sosial dan kesempatan untuk pengembangan profesional juga penting bagi guru. Banyak guru merasa kurang dihargai secara sosial, yang dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen mereka terhadap profesi. Penghargaan non-material yang mencakup pengakuan atas prestasi, penghargaan publik, dan dukungan untuk pengembangan karier sangat penting untuk meningkatkan moral dan dedikasi guru (Fauzan, 2021; Kurniawan, 2022; Warna et al., 2020).

**Tabel 2.** Temuan Terkait Gaji dan Penghargaan bagi Guru

No.	Penulis	Tahun	Temuan
1.	Widiarto	2020	Peran dan posisi guru perlu diperkuat untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi pengelolaan guru saat ini belum optimal. Untuk membentuk guru yang handal, dibutuhkan kebijakan integratif, antara lain: (1) pengelolaan database yang terpadu, (2) alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, (3) kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, (4) proses seleksi dan rekrutmen yang profesional dan transparan, (5) perlindungan guru dalam menjalankan tugas, (6) penyelesaian sertifikasi guru, (7) pengurangan beban administratif, dan (8) pembinaan serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
2.	Warna et al.	2020	Upah kerja, pemberian penghargaan, dan lingkungan kerja semua memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Masing-masing faktor berdampak secara signifikan pada motivasi kerja.
3.	Merdja & Seto	2020	Pemberian gaji dan motivasi kerja memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru harus fokus pada peningkatan gaji dan motivasi kerja.
4.	Fauzan	2021	Pemerintah perlu menyederhanakan proses rekrutmen untuk guru honorer dengan pengalaman yang cukup. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan profesionalisme guru agar menjadi pilihan karir yang menarik untuk generasi mendatang. Hak guru honorer harus dipenuhi dengan memberikan gaji yang sesuai dan mengalokasikan anggaran khusus untuk mereka. Terakhir, prinsip keadilan harus ditegakkan dengan menyeimbangkan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.
5.	Anita et al.	2021	Kompensasi dan lingkungan kerja secara simultan mempengaruhi stres kerja. Penting untuk memberikan kompensasi yang layak dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, termasuk mengadopsi teknologi untuk mengurangi stres kerja guru.
6.	Kurniawan	2022	Kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja serta profesionalisme guru. Perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru dengan memperbaiki kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai (TPP).
7.	Rinanda & Hastalona	2023	Kebijakan pemerintah saat ini belum memadai dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Guru yang baru memulai karir menerima gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain dengan tingkat pendidikan yang sama. Guru swasta sering kali menghadapi kondisi yang lebih buruk, dengan beberapa di antaranya tidak mendapatkan gaji bulanan yang layak dan hanya menerima tunjangan transportasi.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan gaji dan penghargaan bagi guru, seperti pemberian tunjangan profesi dan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Pelaksanaan kebijakan ini sering kali mengalami kendala, seperti keterlambatan pembayaran tunjangan dan kurangnya transparansi dalam distribusi insentif.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja, yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Gaji dan penghargaan yang memadai berpengaruh positif terhadap kualitas pengajaran. Guru yang mendapatkan gaji yang layak dan penghargaan yang memadai lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan lebih cenderung mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Sebaliknya, gaji yang rendah dan kurangnya penghargaan dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan bahkan keinginan untuk meninggalkan profesi. Selain itu, penghargaan dan insentif tambahan bagi guru juga terbatas. Meskipun ada beberapa program insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, namun cakupan dan dampaknya terbatas. Sebagai hasilnya, motivasi dan kepuasan kerja guru sering kali terpengaruh, yang dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas (Anita et al., 2021; Merdja & Seto, 2020). Perlunya peningkatan dalam sistem penggajian dan penghargaan bagi guru di Indonesia agar dapat mencerminkan nilai dan kontribusi penting mereka dalam pembangunan masyarakat dan negara. Upaya untuk meningkatkan gaji dan menyediakan insentif yang lebih baik dapat membantu menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas serta meningkatkan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas pendidikan.

### Otonomi Profesional

Tabel 3. Temuan Terkait Otonomi Profesional

No.	Penulis	Tahun	Temuan
1.	Rohman	2014	Peningkatan otonomi guru menuju profesionalisme dipengaruhi oleh dinamika politik. Politisi ingin otonomi guru mendukung kemajuan masyarakat, sedangkan guru melihatnya sebagai pemenuhan kewajiban undang-undang untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi. Meskipun terdapat kesepakatan pada profesionalisme, beberapa guru terlibat dalam politik secara tersembunyi atau terang-terangan. Selain itu, penguasa daerah sering kali memanfaatkan guru untuk kepentingan politik melalui "politisasi guru," yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Politisasi ini, baik dalam bentuk kooptasi organisasi atau politik pengambilan hati, ber-dampak negatif dengan melemahkan sikap kritis guru, namun juga positif dengan meningkatkan studi lanjut, prestasi, sertifikasi, dan kesejahteraan guru.
2.	Aprillinda	2019	Diperlukan transformasi mendasar dalam sistem pendidikan di negara ini. Sistem pendidikan harus memungkinkan anak-anak untuk berkreasi dan melibatkan guru sebagai motivator yang meningkatkan kompetensi mereka. Lembaga pendidikan perlu menerapkan metode pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada membaca buku dan ujian, tetapi juga pada pemecahan masalah nyata atau tematik. Hal ini memerlukan paradigma pendidikan yang akan terus berkembang di masa depan.

Tingkat otonomi yang dimiliki oleh guru di Indonesia dalam praktik pengajaran mereka bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan sekolah, budaya organisasi, dan dukungan administratif. Meskipun ada upaya untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi siswa, namun masih ada kendala dalam implementasi otonomi profesional ini. Di beberapa sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang memiliki budaya partisipatif dan dukungan administratif yang kuat, guru mungkin memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait pengajaran dan pembelajaran (Aprillinda, 2019). Mereka dapat menggunakan inisiatif mereka sendiri untuk merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal.



Sekolah-sekolah dengan budaya hierarkis dan kurangnya dukungan dari manajemen sekolah, guru mungkin memiliki keterbatasan dalam hal otonomi profesional. Mereka mungkin merasa terkekang oleh pedoman yang ketat atau tekanan untuk mengikuti kurikulum yang telah ditentukan secara ketat, tanpa banyak ruang untuk eksperimen atau inovasi dalam pengajaran (Rohman et al., 2014). Ada variasi dalam tingkat otonomi profesional bagi guru di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan otonomi guru dapat melibatkan pengembangan budaya sekolah yang mendukung kolaborasi dan kreativitas, serta penyediaan pelatihan dan dukungan yang tepat untuk guru dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta memperkuat profesionalisme guru di Indonesia.

### SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh guru di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk peningkatan status profesionalisme mereka. Persyaratan pendidikan dan sertifikasi yang bervariasi, tingkat gaji yang rendah, kurangnya otonomi profesional, dan pandangan tradisional tentang pendidikan semuanya berkontribusi pada pandangan masyarakat terhadap profesi mengajar. Kurangnya pengakuan terhadap guru sebagai profesional yang berharga dalam masyarakat dapat mengurangi motivasi dan kepuasan kerja mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini termasuk penyederhanaan proses sertifikasi, peningkatan gaji dan penghargaan bagi guru, pemberian otonomi yang lebih besar dalam pengajaran, dan transformasi pandangan masyarakat tentang profesi mengajar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan status profesional guru di Indonesia, memperkuat kualitas pendidikan secara keseluruhan, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan potensi siswa. Meningkatkan status profesionalisme guru bukan hanya merupakan investasi dalam masa depan pendidikan, tetapi juga investasi dalam masa depan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

### DAFTAR REFERENSI

- Ananda, D., Muhyani, M., & Suhandi, T. (2020). Systematic literature review implementasi Higher Order Thinking Skills (HOTS) terhadap hasil belajar siswa. *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 10(2), 106–119. <https://doi.org/10.18592/ALADZKAPGMI.V10I2.4005>
- Anita, T., Tjitrosuwarto, S., & Setyohadi, J. S. (2021). Stres kerja guru saat pandemi COVID-19 ditinjau dari kompensasi dan lingkungan kerja. *Research and Development Journal of Education*, 7(1), 146–157. <https://doi.org/10.30998/RDJE.V7I1.8629>
- Aprillinda, M. (2019). Perkembangan guru profesional di era revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2583>

- Disas, E. P. (2017). Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan, 17*(2).  
<https://doi.org/10.17509/JPP.V17I2.8251>
- Fauzan, G. A. (2021). Guru honorer dalam lingkaran ketidakadilan. *Journal on Education, 4*(1), 197–208. <https://doi.org/10.31004/JOE.V4I1.418>
- Gintings, A. (2010). Esensi praktik belajar & pembelajaran: Disiapkan untuk pendidikan profesi dan sertifikasi guru-dosen. *Humaniora Utama Press*.
- Husnunnadia, R., & Masyithoh, S. (2024). Pemberian penghargaan untuk meningkatkan kualitas guru di Madrasah Ibtidaiyah: Tinjauan strategi kepala sekolah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(10), 104–112.  
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.11180954>
- Ichsan, M. (2014). Konsekuensi logis profesionalisme administrasi guru dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Didaktika, 14*(2), 238–259.  
<https://doi.org/10.22373/JID.V14I2.501>
- Indriyani, A., Saefulloh, M., & Riono, S. B. (2020). Pengaruh diklat kependidikan dan kesejahteraan guru terhadap kualitas guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. *Syntax Idea, 2*(7).  
<https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/441>
- Kamaruddin, I., Zulham, Z., Utama, F., & Fadilah, L. (2023). Pendidikan karakter di sekolah: Pengaruhnya terhadap pengembangan etika sosial dan moral siswa. *Attractive : Innovative Education Journal, 5*(3), 140–150.  
<https://doi.org/10.51278/AJ.V5I3.853>
- Kurniawan, I. D. (2022). Pengaruh kebijakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap kinerja dan profesionalisme guru honorer Kabupaten Klaten. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(1), 145–162.  
<https://doi.org/10.31764/JMK.V13I1.7279>
- Latiana, L. (2019). Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. *Edukasi, 13*(1). <https://doi.org/10.15294/EDUKASI.V13I1.951>
- Mansir, F. (2020). Kesejahteraan dan kualitas guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional era digital. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS, 8*(2), 293–303. <https://doi.org/10.36841/PGSDUNARS.V8I2.829>
- Merdja, J., & Seto, S. (2020). Pengaruh pemberian gaji terhadap motivasi kerja dan profesionalisme guru honor. *PEDAGOGIKA, 11*(1), 42–48.  
<https://doi.org/10.37411/PEDAGOGIKA.V11I1.99>
- Musdalifah, R. U. (2021). Makna kerja guru di SMA Negeri 1 Prafi [Universitas Islam Indonesia Yogyakarta]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36027>
- Putriyani, N., Nugroho, K. S., & Riswanda, R. (2018). Implementasi program bantuan operasional sekolah tahun 2016 pada jenjang pendidikan sekolah dasar di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].  
<https://eprints.untirta.ac.id/1189/>
- Riduan, M. (2021). Peran profesi guru dalam pendidikan. *Profesi Keguruan, 1*(2), 1–5.  
<https://doi.org/10.31219/OSF.IO/7SK8F>
- Rinanda, T., & Hastalona, D. (2023). Analisis peran kebijakan pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan dosen di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison*

*Academia and Society*, 3(2), 25–34. <https://doi.org/10.58939/AFOSJ-LAS.V3I2.574>

- Riyadi, L., & Sukmayadi, Y. (2023). Pengaruh musik sebagai media intervensi terhadap kemampuan anak berbahasa. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*, 5(2), 127–138. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v5i2.132>
- Rohman, A., Muhadjir, N., & Suyata, S. (2014). Dinamika relasi politik antara otonomi guru dan dominasi kekuasaan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.21831/JPPFA.V2I2.2622>
- Sholeh, M. I. (2023). Pengakuan dan reward dalam manajemen SDM untuk meningkatkan motivasi guru. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(4), 212–234. <https://doi.org/10.58355/COMPETITIVE.V2I4.41>
- Sopian, A. (2016). Tugas, peran, dan fungsi guru dalam pendidikan. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 88–97. <https://doi.org/10.48094/RAUDHAH.V1I1.10>
- Sunhaji, S. (2014). Kualitas sumber daya manusia (kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru). *Jurnal Kependidikan*, 2(1), 142–160. <https://doi.org/10.24090/JK.V2I1.546>
- Syarafudin, H., & Ikawati, H. D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1(2), 47–51. <https://doi.org/10.36312/JCM.V1I2.87>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77. <https://doi.org/10.24002/IJIS.V1I2.1916>
- Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2016). Tugas guru dalam pembelajaran: Aspek yang memengaruhi. Bumi Aksara.
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. Dalam R. Resnawaty (Ed.), *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 2, Nomor 2). Universitas Padjadjaran. <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I2.13533>
- Warna, E., Suratno, S., & Tiara, T. (2020). Pengaruh upah kerja, penghargaan dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru ekonomi di SMA negeri se Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 1(2), 354–369. <https://doi.org/10.38035/JMPIS.V1I2.274>
- Widiarto, A. (2020). Analisis kebijakan pengelolaan guru di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(1), 89–103. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V11I1.1525>
- Yunalis, Y., & Herman, M. (2018). Implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 205–212. <https://doi.org/10.4321/IJEMAR.V2I1.1826>